

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perwujudan pembangunan daerah yang efektif memerlukan fungsi manajerial yang komprehensif mulai dari perencanaan yang tepat sasaran, penganggaran yang proporsional serta pengendalian dan evaluasi yang efektif. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Setda memiliki fungsi antara lain: Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah; Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Daerah; serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah. Fungsi Setda selaku koordinator pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali atas upaya pencapaian target-target pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan terjemahan atas janji politik Gubernur.

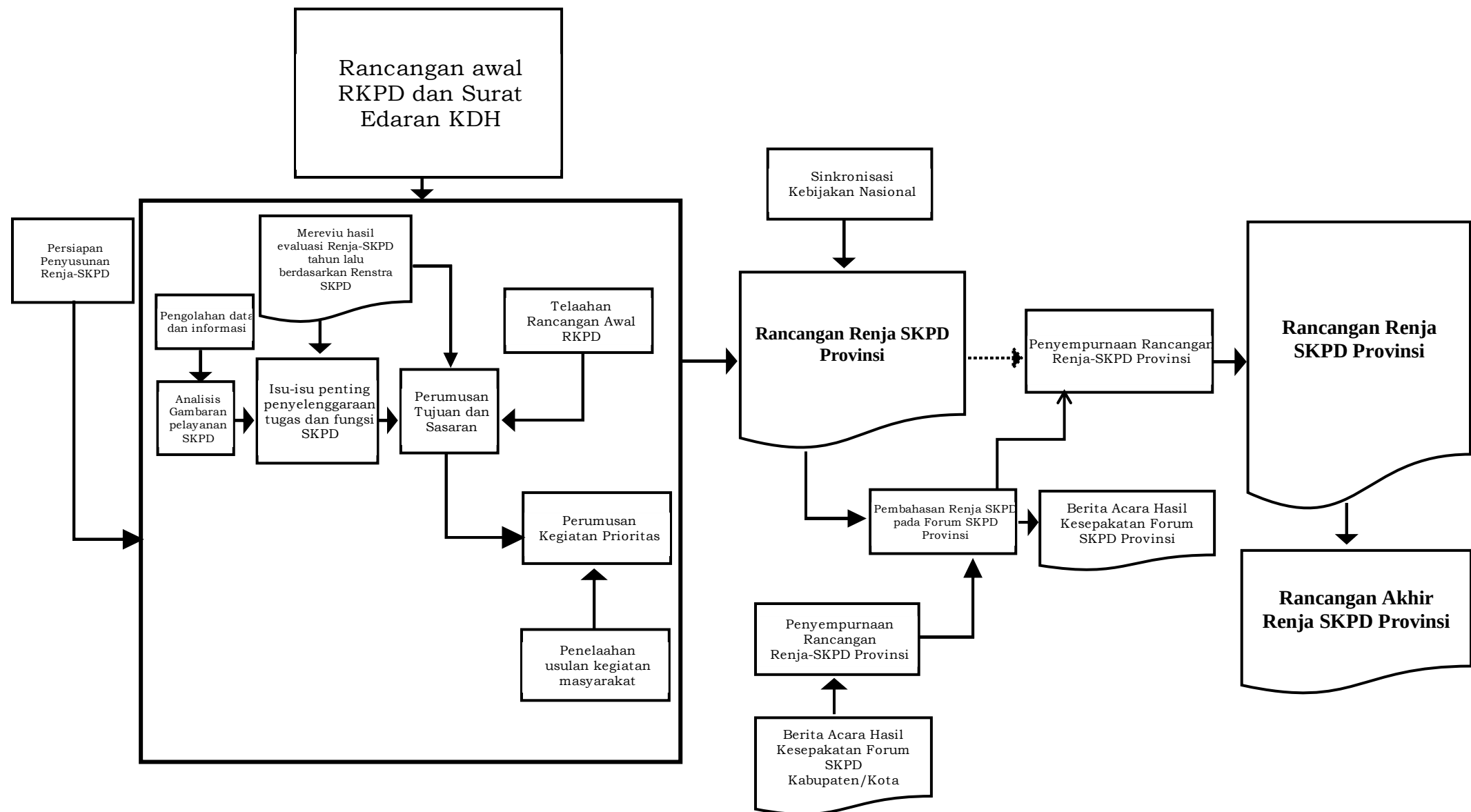
Perwujudan pembangunan daerah yang efektif memerlukan pengendalian pencapaian terget-target pembangunan. Guna melaksanakan fungsi tersebut diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif mulai dari perencanaan tepat sasaran, penganggaran yang proporsional serta pengendalian dan evaluasi yang efektif.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 menetapkan 194 (seratus sembilan puluh empat) indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat, 154 (seratus lima puluh empat) Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum dan Program Unggulan Daerah, dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Aspek Daya Saing. Terkait indikator-indikator kinerja tersebut, Setda berperan sebagai koordinator sekaligus pengendali atas upaya pencapaian target-target nya.

Dalam rangka implementasi tugas dan fungsinya, Setda merumuskan Rencana Strategis 2018-2023 melalui metode *cascading* yang mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diamanatkan

pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Setda merumuskan tujuan organisasi yaitu “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintah Daerah”.

Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta dalam rangka persiapan pengendalian pencapaian target-target pembangunan daerah tahun 2021, Sinergi dengan kebutuhan meningkatkan efektifitas peran dalam menunjang perwujudan target-target pembangunan, Setda menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang mendasarkan pada target pencapaian tahun ketiga RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan tahun ketiga Renstra Setda Tahun 2018-2023.



Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renja SKPD Provinsi

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, disusun mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah khususnya pada Kementerian/Lembaga terkait, antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Provinsi Jawa Tengah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
28. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0000549 tanggal 15 Januari 2020 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Serta Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga program dan kegiatan berjalan secara sistematis, efektif, dan efisien.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2021 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 pada tahun ke-3 periode Tahun 2021.
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
 - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 - 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan
 - 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - 4.1. Program dan Kegiatan
- BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018

Evaluasi pelaksanaan Renja Setda Tahun 2019 didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki 12 indikator, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); Program Penataan Peraturan Perundang-undangan memiliki 2 indikator, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah memiliki 25 indikator, memiliki ketercapaian sangat tinggi (100%); Program Peningkatan Fungsi Perangkat Daerah memiliki 10 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki 2 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki 2 indikator, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan memiliki 3 indikator, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%).

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memiliki 12 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi antara lain Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan dengan realisasi 100% melebihi target 85%; Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset dengan realisasi 100% melebihi target 85% dan Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang

Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata dengan realisasi 81,25% melebihi target 80%. Manfaat dari program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan peran dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan kepada Pimpinan. Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memiliki 25 Kegiatan dengan 27 indikator kinerja kegiatan yang seluruhnya tercapai sangat tinggi.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, memiliki 2 Indikator Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase efektifitas produk hukum daerah dengan realisasi 175% melebihi target 90% tingginya tingkat capaian sebesar 194,44% hal ini disebabkan percepatan penataan perundang undangan daerah dalam rangka melaksanakan deregulasi dan simplifikasi hukum yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan menjadi visi misi Gubernur serta penyesuaian perkembangan regulasi di tingkat pusat dan produk hukum yang di review terkait dengan produk hukum daerah lainnya dan Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang undangan dengan realisasi 100% melebihi target 90%. Manfaat dari program Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, adalah Optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum.

Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, memiliki 25 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat dengan realisasi 78% sesuai target; Persentase Kabupaten/Kota peduli HAM dengan realisasi 97% melebihi target 90%; Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target dengan realisasi 96,6% melebihi target 80%. Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya dengan realisasi 85% sesuai target; Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD dengan realisasi 100% sesuai target dan Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya dengan realisasi 85% sesuai target. Manfaat dari program Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah adalah Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.

Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah memiliki 41 Kegiatan dengan 59 indikator kinerja kegiatan yang seluruhnya tercapai sangat tinggi. Pada Program Peningkatan Kualitas

Pelaksanaan Kebijakan Daerah terdapat terdapat indikator kegiatan yang tidak mencapai target yaitu pada Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK yang memiliki indikator kegiatan Jumlah kabupaten/kota peduli HAM dengan target sebanyak 35 kabupaten/kota hanya terealisasi 34 kabupaten/kota (97,14%). Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Temanggung tidak mengirimkan Laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pembinaan secara intensif kepada Sekda Kabupaten Temanggung.

Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah, memiliki 10 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya 85% sesuai target; Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya dengan realisasi 100% melebihi target 80%; Persentase perangkat daerah bidang Umum yang evaluasi pelaksanaan fungsinya 100% sesuai target dan Persentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya dengan realisasi 100% melebihi target 80%. Manfaat dari Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah, adalah Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah memiliki 22 Kegiatan dengan 22 indikator kinerja kegiatan yang seluruhnya tercapai sangat tinggi.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memiliki 2 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah dengan realisasi 100% sesuai target dan Persentase tertib administrasi pemerintahan dengan realisasi 100% sesuai target. Manfaat dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor yang mendukung pencapaian sasaran. Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah, memiliki 2 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Fasilitasi Dokumen

Administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD dengan realisasi 100% sesuai target dan Persentase Rata-Rata Ketercapaian IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan realisasi 100% sesuai target. Manfaat dari Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki 4 Kegiatan dengan 9 indikator kinerja kegiatan yang seluruhnya tercapai sangat tinggi.

Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan, memiliki 3 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase layanan liputan dan keprotokolan dengan realisasi 100% sesuai target dan Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan dengan realisasi 100% sesuai target. Manfaat dari Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan adalah Peningkatan kualitas pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan. Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan memiliki 9 Kegiatan dengan 10 indikator kinerja kegiatan yang seluruhnya tercapai sangat tinggi. Pada Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah terdapat indikator kegiatan yang tidak mencapai target yaitu pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang memiliki indikator kegiatan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar dengan target sebanyak 40 orang hanya terealisasi 33 orang (82,15%). Hal tersebut dikarenakan peserta diklat berhalangan hadir karena bersamaan dengan agenda lain. Biro Organisasi menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan verifikasi ulang pada ajuan peserta diklat dari seluruh biro lingkup setda.

Berikut hasil revidi terhadap Rencana Kerja Tahun 2019 dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2019 yang dituangkan dalam tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH S/D TAHUN 2019 PROVINSI JAWA TENGAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
							TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
0				NON URUSAN									
0	00			NON URUSAN									
0	00	01		Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda(Biro Administrasi Pembangunan Daerah)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					2 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum(Biro Hukum)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					3 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda(Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					4 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat(Biro Kesejahteraan Rakyat)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					5 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker(Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
									TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					6	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perencanaan(Biro Perencanaan Daerah)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					7	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah(Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					8	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah(Biro Umum)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					9	Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian(Biro Organisasi)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					10	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan(Biro Organisasi)	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
0	00	01	0001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
0	00	01	0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
0	00	01	0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
0	00	01	0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
0 00 01 0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perencanaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kearsipan	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
							TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
0	00	01	0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	100 %
0	00	01	0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	100 %
0	00	01	0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perencanaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	100 %
0	00	01	0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	100 %
0	00	01	0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	100 %
0	00	01	0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	100 %
0	00	01	0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	100 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
0 00 01 0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
0 00 01 0008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
0	00	01	0010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %
0	00	01	0011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	10 Paket	10 Paket	46 Paket	46 Paket	100 %	460 %
0	00	01	0013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	20 %
0	00	01	0014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	3900 Set	165 Set	800 Set	950 Set	118,8 %	24,36 %
0	00	01	0015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	200 Orang	0 Orang	40 Orang	33 Orang	82,5 %	16,5 %
0	00	01	0016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	20 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	20 %
0	00	01	0020	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %
0	00	01	0021	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %
0	00	01	0022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %
0	00	01	0023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
0	00	02		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	85 %	0 %	85 %	100 %	117,65 %	117,65 %	85 %	100 %	117,65 %
0	00	02	0001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	16,67 %	1 Dokumen	1 Dokumen	16,67 %
0	00	02	0002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Setda	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	20 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	06			FUNGSI LAINNYA										
4	06	15		Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					2 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					3 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	96 %	0 %	100 %	100 %	100 %	104,2 %	100 %	100 %	104,17 %
					4 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		5 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		6 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	100 %	0 %	85 %	100 %	117,65 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		7 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		8 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	85 %	0 %	85 %	100 %	117,65 %	117,6 %	85 %	100 %	117,65 %
		9 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80 %	0 %	80 %	81,3 %	101,56 %	101,6 %	80 %	81,3 %	101,56 %
		10 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	96 %	0 %	80 %	81,5 %	101,85 %	84,88 %	85 %	81,5 %	84,88 %

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					11 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	93 %	0 %	83 %	84,9 %	102,23 %	91,24 %	85 %	84,9 %	91,24 %
					12 Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	06	15	0001	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	20 %	1 dokumen	1 dokumen	20 %
4	06	15	0002	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	10 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	20 %	2 dokumen	2 dokumen	20 %
4	06	15	0003	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM	Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	20 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	20 %	4 dokumen	4 dokumen	20 %
4	06	15	0004	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	25 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %	20 %	5 dokumen	5 dokumen	20 %
4	06	15	0005	Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	15 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	20 %	3 dokumen	3 dokumen	20 %
4	06	15	0006	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	15 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	20 %	3 dokumen	3 dokumen	20 %
4	06	15	0007	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	10 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	20 %	2 dokumen	2 dokumen	20 %

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4	06	15	0008	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	20 %	1 dokumen	1 dokumen	20 %
4	06	15	0009	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	20 %	1 dokumen	1 dokumen	20 %
4	06	15	0010	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang pelayanan kehidupan beragama	10 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	20 %	2 dokumen	2 dokumen	20 %
4	06	15	0011	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	20 %	1 dokumen	1 dokumen	20 %
4	06	15	0012	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	20 %	1 dokumen	1 dokumen	20 %
4	06	15	0013	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	20 %	1 dokumen	1 dokumen	20 %
4	06	15	0014	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	20 %	1 dokumen	1 dokumen	20 %
4	06	15	0015	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	3 dokumen	1 dokumen	100 %

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4	06	15	0016	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	20 %	3 dokumen	3 dokumen	20 %
4	06	15	0017	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	20 %	2 dokumen	3 dokumen	20 %
4	06	15	0018	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	20 %	2 dokumen	2 dokumen	20 %
4	06	15	0019	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	10 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	20 %	3 dokumen	2 dokumen	20 %
4	06	15	0020	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	9 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	11,11 %	2 dokumen	1 dokumen	11,11 %
4	06	15	0021	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	10 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	20 %	2 dokumen	2 dokumen	20 %
4	06	15	0022	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	13 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	23,08 %	1 dokumen	3 dokumen	23,08 %
4	06	15	0023	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	20 %	1 dokumen	1 dokumen	20 %
4	06	15	0024	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	1 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	20 %	50 dokumen	1 dokumen	20 %
					2 Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	250 dokumen	132 dokumen	50 dokumen	69 dokumen	138 %	27,6 %	1 dokumen	69 dokumen	27,6 %

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4	06	15	0025	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri	1 Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	20 %	1 dokumen	1 dokumen	20 %
					2 Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	06	16		Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1 Persentase efektifitas produk hukum daerah	94 %	0 %	90 %	175 %	194,4 %	186,2 %	91 %	175 %	186,17 %
					2 Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	94 %	0 %	90 %	100 %	111,1 %	106,4 %	91 %	100 %	106,38 %
4	06	16	0026	Kegiatan Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah	1 Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	15 Raperda	0 Raperda	15 Raperda	16 Raperda	106,7 %	106,7 %	15 Raperda	16 Raperda	106,67 %
					2 Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	100 Dokumen	0 Dokumen	100 Dokumen	534 Dokumen	534 %	534 %	110 Dokumen	534 Dokumen	534 %
4	06	17		Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	1 Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	94 %	0 %	90 %	107 %	118,9 %	113,8 %	91 %	107 %	113,83 %
					2 Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	97 %	73 %	78 %	78 %	100 %	80,41 %	82 %	78 %	80,41 %
					3 Persentase kabupaten/kota peduli HAM	94 %	0 %	90 %	97 %	107,8 %	103,2 %	91 %	97 %	103,19 %
					4 Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	85 %	14 %	28 %	40 %	142,9 %	47,06 %	42 %	40 %	47,06 %
					5 Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	48 %	0 %	14 %	37,1 %	265,3 %	77,38 %	23 %	37,1 %	77,38 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		6 Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	88 %	0 %	80 %	96,6 %	120,8 %	109,8 %	82 %	96,6 %	109,77 %
		7 Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	100 %	0 %	80 %	100 %	125 %	100 %	85 %	100 %	100 %
		8 Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	100 %	0 %	85 %	85 %	100 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		9 Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	100 %	0 %	80 %	100 %	125 %	100 %	85 %	100 %	100 %
		10 Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	100 %	0 %	80 %	100 %	125 %	100 %	85 %	100 %	100 %
		11 Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	100 %	0 %	85 %	85 %	100 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		12 Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	97 %	88 %	87 %	87 %	100 %	89,69 %	90 %	87 %	89,69 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		13 Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	95 %	90 %	85 %	85 %	100 %	89,47 %	89 %	85 %	89,47 %
		14 Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	100 %	0 %	85 %	85 %	100 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		15 Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		16 Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	98 %	88 %	85 %	85 %	100 %	86,73 %	90 %	85 %	86,73 %
		17 Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	88 %	0 %	87 %	95,6 %	109,9 %	108,7 %	87 %	95,6 %	108,67 %
		18 Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	86 %	80 %	83 %	83 %	100 %	96,51 %	84 %	83 %	96,51 %
		19 Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	100 %	50 %	52,3 %	66,7 %	127,5 %	66,67 %	68 %	66,7 %	66,67 %
		20 Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	100 %	64 %	68 %	68 %	100 %	68 %	74 %	68 %	68 %
		21 Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	90 %	0 %	85 %	85,5 %	100,6 %	95 %	87 %	85,5 %	95 %
		22 Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	94 %	0 %	90 %	100 %	111,1 %	106,4 %	91 %	100 %	106,38 %

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
									TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					23	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	94 %	0 %	90 %	100 %	111,1 %	106,4 %	91 %	100 %	106,38 %
					24	Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	59,5 %	0 %	9,65 %	17,7 %	183,4 %	29,73 %	22,1 %	17,7 %	29,73 %
					25	presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	63 %	0 %	39 %	95,8 %	245,7 %	152,1 %	45 %	95,8 %	152,11 %
4	06	17	0001	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	1	Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	90 %	86,11 %	85 %	86 %	101,2 %	95,56 %	87 %	86 %	95,56 %
					2	Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	90 %	86,11 %	85 %	86 %	101,2 %	95,56 %	87 %	86 %	95,56 %
					3	Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	90 %	86,11 %	85 %	86 %	101,2 %	95,56 %	87 %	86 %	95,56 %
4	06	17	0002	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah		Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	86 %	86 %	85 %	85,5 %	100,6 %	99,42 %	85 %	85,5 %	99,42 %
4	06	17	0003	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jawa Tengah		Jumlah Dokumen SHB dan ASB	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4	06	17	0004	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	1	Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	85 %	95 %	80 %	97,7 %	122,1 %	122,1 %	82 %	97,7 %	114,89 %
					2	Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	85 %	95 %	80 %	94 %	117,5 %	117,5 %	82 %	94 %	110,62 %

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4	06	17	0005	Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kabupaten/Kota	1 Persentase usulan Pembangunan Kab/Kota Wil II yang ditindaklanjuti	0 %	85 %	85 %	100 %	117,6 %	117,6 %	0 %	100 %	100 %
				2 Persentase usulan Pembangunan Kab/Kota Wil I yang ditindaklanjuti	0 %	85 %	85 %	100 %	117,6 %	117,6 %	0 %	100 %	100 %	
4	06	17	0006	Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	1 Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
				2 Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
4	06	17	0007	Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah	1 Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
				2 Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %	
4	06	17	0008	Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/ Kota	Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	70 %	72,3 %	70 %	80 %	114,3 %	114,3 %	0 %	80 %	114,29 %
4	06	17	0009	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan	jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	20 %
4	06	17	0010	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT	jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	20 %
4	06	17	0011	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM	jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	15 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	20 %
4	06	17	0012	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Keuangan	jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	20 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	20 %
4	06	17	0013	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi	jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	15 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	20 %
4	06	17	0014	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan	jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	20 %
4	06	17	0015	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata	jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	20 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4 06 17 0016	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4 06 17 0017	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4 06 17 0018	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan	Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	20 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	20 %
4 06 17 0019	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4 06 17 0020	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4 06 17 0021	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4 06 17 0022	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil	Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4 06 17 0023	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah Laporan monitoring bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4 06 17 0024	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	4 Laporan	5 Laporan	125 %
4 06 17 0025	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral	jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	3 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	3 Laporan	4 Laporan	133,33 %

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4	06	17	0026	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	3 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	3 Laporan	2 Laporan	66,667 %
4	06	17	0027	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan	jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %
4	06	17	0028	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	7 Laporan	0 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	6 Laporan	7 Laporan	100 %
4	06	17	0029	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	35 Kabupaten	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %	100 %	35 Kabupaten /Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %
4	06	17	0030	Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	100 %	100 %	48 OPD	48 OPD	100 %
4	06	17	0031	Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan	1 Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	35 Kabupaten	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %	100 %	35 Kabupaten /Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %
					2 Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	100 %	100 %	48 OPD	48 OPD	100 %
4	06	17	0032	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik	1 jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	35 Kabupaten	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %	100 %	35 Kabupaten /Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %
					2 Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	100 Unit	100 Unit	100 Unit	105 Unit	105 %	105 %	100 Unit	105 Unit	105 %

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020		
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
4	06	17	0033	Kegiatan Pengembangan Tatalaksanaan Pemerintahan	1	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	35 Kabupaten	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %	100 %	35 Kabupaten /Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %
					2	Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	240 Unit	0 Unit	290 Unit	290 Unit	100 %	100 %	240 Unit	290 Unit	120,83 %
4	06	17	0034	Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas	1	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	35 Kabupaten	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %	100 %	35 Kabupaten /Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %
					2	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	100 %	100 %	48 OPD	48 OPD	100
					3	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	35 Kabupaten	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten /Kota	100 %	100 %	35 Kabupaten /Kota	35 Kabupaten /Kota	100
					4	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	100 %	100 %	48 OPD	48 OPD	100
4	06	17	0035	Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	100 %	100 %	48 OPD	48 OPD	100 %
4	06	17	0036	Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota	1	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	135 Dokumen	0 Dokumen	110 Dokumen	229 Dokumen	208,2 %	208,2 %	123 Dokumen	229 Dokumen	169,63 %
					2	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	140 Dokumen	0 Dokumen	115 Dokumen	261 Dokumen	227 %	227 %	127 Dokumen	261 Dokumen	186,43
4	06	17	0037	Publikasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum	1	Jumlah produk hukum yang didokumentasi	90 Dokumen	0 Dokumen	90 Dokumen	94 Dokumen	104,4 %	104,4 %	90 Dokumen	94 Dokumen	104,44 %
					2	Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	80 Dokumen	0 Dokumen	60 Dokumen	64 Dokumen	106,7 %	106,7 %	65 Dokumen	64 Dokumen	80
					3	Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	150 Buku	0 Buku	150 Buku	416 Buku	277,3 %	277,3 %	150 Buku	416 Buku	277,33

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
406170038	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	1 Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	240 Perkara	180 Perkara	190 Perkara	190 Perkara	100 %	100 %	190 Perkara	190 Perkara	79,17 %
		2 Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	10 Perkara	6 Perkara	9 Perkara	14 Perkara	155,6 %	155,6 %	9 Perkara	14 Perkara	140
		3 Penanganan sengketa hukum	8 Sengketa	0 Sengketa	4 Sengketa	4 Sengketa	100 %	100 %	5 Sengketa	4 Sengketa	50
406170039	Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK	1 Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
		2 Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	35 Kabupaten	0 Kabupaten/ Kota	35 Kabupaten/ Kota	34 Kabupaten /Kota	97,14 %	97,14 %	35 Kabupaten /Kota	34 Kabupaten /Kota	97,14
406170040	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	4 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	4 Laporan	5 Laporan	125 %
406170041	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %
40618	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah	1 Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %	0 %	85 %	85 %	100 %	100 %	85 %	85 %	85 %
		2 Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %	0 %	85 %	85 %	100 %	100 %	85 %	85 %	85 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		3 Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4 Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	92 %	92 %	82 %	100 %	122 %	122 %	85 %	100 %	108,7 %
		5 Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	90 %	90 %	80 %	100 %	125 %	125 %	83 %	100 %	111,11 %
		6 Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		7 Persentase tingkat kesehatan BUMD	90 %	90 %	80 %	93,3 %	116,7 %	116,7 %	82 %	93,3 %	103,7 %
		8 Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %	0 %	80 %	100 %	125 %	125 %	85 %	100 %	100 %
		9 Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %	0 %	80 %	100 %	125 %	125 %	85 %	100 %	100 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					10 Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %	0 %	80 %	100 %	125 %	125 %	85 %	100 %	100 %
4	06	18	0001	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
4	06	18	0002	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4	06	18	0003	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	20 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	20 %
4	06	18	0004	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4	06	18	0005	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	20 %
4	06	18	0006	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4	06	18	0007	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	20 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020				
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
4	06	18	0008	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
4	06	18	0009	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4	06	18	0010	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4	06	18	0011	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4	06	18	0012	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	Dokumen	1 Dokumen	100 %
4	06	18	0013	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
4	06	18	0014	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	100 %

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4	06	18	0015	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas	5 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	1 Laporan	2 Laporan	40 %
4	06	18	0016	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	20 %
4	06	18	0017	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	10 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	20 %
4	06	18	0018	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
4	06	18	0019	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
4	06	18	0020	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Ketahanan Pangan	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
4	06	18	0021	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
4	06	18	0022	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	10 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	20 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4	06	19		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					2 Persentase tertib administrasi pemerintahan	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	06	19	0001	Kegiatan administrasi penataan wilayah	1 Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %
					2 Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %
					3 Jumlah dokumen penegasan batas daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %
4	06	19	0002	Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %
4	06	19	0003	Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu	1 Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %
					2 Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %
4	06	19	0004	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	1 Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	36 Wilayah	0 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	100 %	100 %
					2 Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36 Wilayah	0 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	100 %	100 %

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
									TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
						3 Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36 Wilayah	0 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	100 %	100 %	36 Wilayah	36 Wilayah	100 %
4	06	20			Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
						2 Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	06	20	0001		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah	1 Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota	65 Dokumen	0 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100 %	100 %	13 Dokumen	13 Dokumen	20 %
						2 Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota	73 Dokumen	0 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	35 Dokumen	47,95 %
4	06	20	0002		Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD	1 Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH	58 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	21 Dokumen	5 Dokumen	8,62 %
						2 Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD	115 Dokumen	0 Dokumen	30 Dokumen	35 Dokumen	116,7 %	116,7 %	5 Dokumen	35 Dokumen	30,43 %
4	06	21			Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan	1 Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
						2 Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
						3 Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	06	21	0001		Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah	Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	15 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	20 %

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TINGKAT REALISASI S/D TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
								TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
4	06	21	0002	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah	Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah	6000 Laporan	1200 Laporan	1200 Laporan	1903 Laporan	158,6 %	158,6 %	1200 Laporan	1903 Laporan	32 %
4	06	21	0003	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4	06	21	0004	Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum	Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	10 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	20 %
4	06	21	0005	Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah	Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4	06	21	0006	Kegiatan Keprotokolan	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	20 %
4	06	21	0007	Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan Harga	Jumlah Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan Harga	0 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4	06	21	0008	Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	60 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	20 %
4	06	21	0009	Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan	1 jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
					2 jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Tahun 2019. Target Renja Setda tahun 2019 sampai dengan 2020, realisasi indikator kinerja tahun 2019 dan 2020 (Triwulan II) sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2. sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Kebijakan yang Efektif	80 %	81 %	82 %	83 %	93,02 %	93,02 %	82 %	83 %	
2	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80 %	81 %	82 %	83 %	86,36 %	86,36 %	82 %	83 %	
3	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75 %	76 %	77 %	78 %	75,63 %	75,63 %	77 %	78 %	
4	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	85 %	85 %	
5	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	85 %	85 %	
6	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70 %	75 %	80 %	85 %	71 %	71 %	80 %	85 %	
7	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85 %	85 %	85 %	85 %	85,71 %	85,71 %	85 %	85 %	
8	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	80 %	85 %	90 %	93 %	83,05 %	83,05 %	90 %	93 %	
9	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	90 %	91 %	92 %	93 %	100 %	100 %	92 %	93 %	
10	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81 %	87 %	92 %	93 %	100 %	100 %	92 %	93 %	
11	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80 %	82 %	83 %	84 %	81 %	81 %	83 %	84 %	
12	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80 %	82 %	83 %	84 %	96,6 %	96,6 %	83 %	84 %	
13	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80 %	81 %	82 %	83 %	95,63 %	95,63 %	82 %	83 %	
14	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	90 %	91 %	92 %	93 %	100 %	100 %	92 %	93 %	
15	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	90 %	91 %	92 %	93 %	100 %	100 %	92 %	93 %	
16	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	90 %	91 %	92 %	93 %	100 %	100 %	92 %	93 %	
17	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	19 %	22 %	25 %	28 %	24,78 %	24,78 %	25 %	28 %	
18	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52,1 %	64,32 %	76,48 %	88,64 %	92,63 %	92,63 %	76,48 %	88,64 %	
19	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73 %	78 %	82 %	87 %	75 %	75 %	82 %	87 %	
20	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	25 %	40 %	54 %	70 %	40 %	40 %	54 %	70 %	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80 %	84 %	88 %	92 %	100 %	100 %	88 %	92 %	
22	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85 %	85 %	85 %	85 %	88,46 %	88,46 %	85 %	85 %	
23	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85 %	89 %	90 %	93 %	87,5 %	87,5 %	90 %	93 %	
24	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60 %	63 %	65 %	67 %	96,93 %	96,93 %	65 %	67 %	
25	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85 %	85 %	85 %	85 %	85,71 %	85,71 %	85 %	85 %	
26	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80 %	84 %	88 %	92 %	75 %	75 %	88 %	92 %	
27	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
28	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85 %	85 %	85 %	85 %	85,41 %	85,41 %	85 %	85 %	
29	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	90 %	100 %	100 %	
30	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
31	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
32	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	75 %	76 %	77 %	78 %	75,63 %	75,63 %	77 %	78 %	
33	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda(Biro Administrasi Pembangunan Daerah)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% %	100 %	100 %	
34	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum(Biro Hukum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% %	100 %	100 %	
35	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda(Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% %	100 %	100 %	
36	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat(Biro Kesejahteraan Rakyat)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% %	100 %	100 %	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker(Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% %	100 %	100 %	
38	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian(Biro Perekonomian Daerah)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% %	100 %	100 %	
39	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah(Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% %	100 %	100 %	
40	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah(Biro Umum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% %	100 %	100 %	
41	Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian(Biro Organisasi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% %	100 %	100 %	
42	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan(Biro Organisasi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% %	100 %	100 %	
43	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
44	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
45	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
46	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
47	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
48	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
49	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
50	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
51	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
52	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
53	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
54	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
56	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
57	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
58	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
59	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
60	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
61	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
62	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
63	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinun Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
64	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
65	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
66	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
67	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
68	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
69	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
70	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
71	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
73	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	46 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	46 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	
74	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
75	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	800 Set	900 Set	900 Set	400 Set	950 Set	900 Set	900 Set	400 Set	
76	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/ Seminar	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	33 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	
77	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
78	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
79	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
80	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
81	Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaianya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
82	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	85 %	85 %	85 %	
83	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
84	Jumlah laporan evaluasi Setda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
85	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
86	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
87	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
88	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
89	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
90	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
92	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	85 %	85 %	85 %	
93	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80 %	80 %	80 %	80 %	81,25 %	80 %	80 %	80 %	
94	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	80 %	85 %	90 %	93 %	81,48 %	85 %	90 %	93 %	
95	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	83 %	85 %	88 %	90 %	84,85 %	85 %	88 %	90 %	
96	Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
97	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
98	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
99	Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
100	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
101	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
102	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
103	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
104	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
105	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
106	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
107	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
108	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
110	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
111	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	
112	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
113	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
114	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
115	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
116	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
117	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
118	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	
119	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
120	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
121	Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	69 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	
122	Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
123	Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
124	Persentase efektifitas produk hukum daerah	90 %	91 %	92 %	93 %	175 %	91 %	92 %	93 %	
125	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	90 %	91 %	92 %	93 %	100 %	91 %	92 %	93 %	
126	Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	15 Raperda	15 Raperda	16 Raperda	16 Raperda	16 Raperda	15 Raperda	16 Raperda	16 Raperda	
127	Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	100 Dokumen	110 Dokumen	120 Dokumen	130 Dokumen	534 Dokumen	110 Dokumen	120 Dokumen	130 Dokumen	
128	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	90 %	91 %	92 %	93 %	107 %	91 %	92 %	93 %	
129	Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	78 %	82 %	87 %	92 %	78 %	82 %	87 %	92 %	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	90 %	91 %	92 %	93 %	97 %	91 %	92 %	93 %	
131	Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	28 %	42 %	57 %	71 %	40 %	42 %	57 %	71 %	
132	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	14 %	23 %	31 %	40 %	37,14 %	23 %	31 %	40 %	
133	Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	80 %	82 %	83 %	84 %	96,6 %	82 %	83 %	84 %	
134	Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	85 %	90 %	95 %	
135	Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %	85 %	90 %	95 %	85 %	85 %	90 %	95 %	
136	Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	85 %	90 %	95 %	
137	Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	85 %	90 %	95 %	
138	Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %	85 %	90 %	95 %	85 %	85 %	90 %	95 %	
139	Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	87 %	90 %	93 %	95 %	87 %	90 %	93 %	95 %	
140	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %	89 %	90 %	93 %	85 %	89 %	90 %	93 %	
141	Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %	85 %	90 %	95 %	85 %	85 %	90 %	95 %	
142	Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
143	Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	85 %	90 %	92 %	96 %	85 %	90 %	92 %	96 %	
144	Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	87 %	87 %	88 %	88 %	95,63 %	87 %	88 %	88 %	
145	Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	83 %	84 %	85 %	85 %	83 %	84 %	85 %	85 %	
146	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	52,3 %	67,99 %	78,59 %	89,19 %	66,67 %	67,99 %	78,59 %	89,19 %	
147	Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	68 %	74 %	83 %	92 %	68 %	74 %	83 %	92 %	
148	Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	85 %	87 %	88 %	89 %	85,5 %	87 %	88 %	89 %	
149	Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	90 %	91 %	92 %	93 %	100 %	91 %	92 %	93 %	
150	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	90 %	91 %	92 %	93 %	100 %	91 %	92 %	93 %	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	9,65 %	22,12 %	34,59 %	47,06 %	17,7 %	22,12 %	34,59 %	47,06 %	
152	presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	39 %	45 %	51 %	57 %	95,83 %	45 %	51 %	57 %	
153	Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	85 %	87 %	88 %	89 %	86 %	87 %	88 %	89 %	
154	Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	85 %	87 %	88 %	89 %	86 %	87 %	88 %	89 %	
155	Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	85 %	87 %	88 %	89 %	86 %	87 %	88 %	89 %	
156	Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	85 %	85 %	86 %	86 %	85,5 %	86 %	86 %	86 %	
157	Jumlah Dokumen SHB dan ASB	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
158	Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	80 %	82 %	83 %	84 %	97,66 %	82 %	83 %	84 %	
159	Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	80 %	82 %	83 %	84 %	94,03 %	82 %	83 %	84 %	
160	Persentase usulan Pembangunan Kab/Kota Wil II yang ditindaklanjuti	85 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	
161	Persentase usulan Pembangunan Kab/Kota Wil I yang ditindaklanjuti	85 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	
162	Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
163	Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
164	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
165	Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
166	Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	70 %	0 %	0 %	0 %	80 %	0 %	0 %	0 %	
167	jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
168	jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
169	jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
170	jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
171	jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
172	jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
173	jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
174	Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
175	Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
176	Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
177	Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
179	Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
180	Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
181	Jumlah Laporan monitoring bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Perbedaan Target Tabel 2.2 - BAB IV Renstra
182	jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
183	jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
184	jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
185	jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
186	jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	7 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	
187	Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	
188	Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	
189	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	
190	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	
191	jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	
192	Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	105 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	
193	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	
194	Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	290 Unit	240 Unit	240 Unit	240 Unit	290 Unit	240 Unit	240 Unit	240 Unit	
195	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	
196	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	
197	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	
199	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	
200	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	110 Dokumen	123 Dokumen	128 Dokumen	132 Dokumen	229 Dokumen	123 Dokumen	128 Dokumen	132 Dokumen	
201	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	115 Dokumen	127 Dokumen	132 Dokumen	138 Dokumen	261 Dokumen	127 Dokumen	132 Dokumen	138 Dokumen	
202	Jumlah produk hukum yang didokumentasi	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	94 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	
203	Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	60 Dokumen	65 Dokumen	70 Dokumen	75 Dokumen	64 Dokumen	65 Dokumen	70 Dokumen	75 Dokumen	
204	Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	150 Buku	150 Buku	150 Buku	150 Buku	416 Buku	150 Buku	150 Buku	150 Buku	
205	Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	180 Perkara	190 Perkara	200 Perkara	220 Perkara	190 Perkara	190 Perkara	200 Perkara	220 Perkara	Perbedaan Target Tabel 2.2 - BAB IV Renstra
206	Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	8 Perkara	9 Perkara	9 Perkara	10 Perkara	14 Perkara	9 Perkara	9 Perkara	10 Perkara	Perbedaan Target Tabel 2.2 - BAB IV Renstra
207	Penanganan sengketa hukum	4 Sengketa	5 Sengketa	6 Sengketa	7 Sengketa	4 Sengketa	5 Sengketa	6 Sengketa	7 Sengketa	
208	Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
209	Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	35 Kabupaten/ Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	34 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	35 Kabupate n/Kota	Croscek realisasi 2019
210	jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
211	jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
212	Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %	85 %	85 %	90 %	85 %	85 %	85 %	90 %	
213	Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %	85 %	85 %	90 %	85 %	85 %	85 %	90 %	
214	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
215	Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	82 %	85 %	87 %	90 %	100 %	85 %	87 %	90 %	
216	Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	80 %	83 %	85 %	89 %	100 %	83 %	85 %	89 %	
217	Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
218	Persentase tingkat kesehatan BUMD	80 %	82 %	85 %	88 %	93,33 %	82 %	85 %	88 %	
219	Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	85 %	90 %	95 %	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	85 %	90 %	95 %	
221	Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	85 %	90 %	95 %	
222	Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
223	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
224	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
225	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
226	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
227	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
228	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
229	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
230	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
231	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
232	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
233	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
234	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
235	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
236	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas	2 Laporan	1 Laporan	Laporan	Laporan	2 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	Laporan	2 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	
238	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
239	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
240	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
241	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
242	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
243	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
244	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
245	Persentase tertib administrasi pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
246	Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
247	Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
248	Jumlah dokumen penegasan batas daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
249	Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
251	Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
252	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	
253	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	
254	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	36 Wilayah	
255	Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
256	Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
257	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	
258	Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota	35 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	35 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
259	Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH	5 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	7 Dokumen	
260	Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD	30 Dokumen	5 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	35 Dokumen	5 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	
262	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
263	Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
264	Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
265	Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
266	Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah	1200 Laporan	1200 Laporan	1200 Laporan	1200 Laporan	1903 Laporan	1200 Laporan	1200 Laporan	1200 Laporan	
267	Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
268	Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
269	Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
270	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
271	Jumlah Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan Harga	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
272	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
273	jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
274	jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda

Memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaan pembangunan yang terencana dan mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik, berikut isu-isu penting di lingkup Sekretariat Daerah, yaitu:

- 1). Peningkatan peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset,
- 2). Peningkatan peran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Pemerintahan,
- 3). Peningkatan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri,
- 4). Peningkatan peran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
- 5). Peningkatan peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat,
- 6). Peningkatan peran Biro Perekonomian dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perekonomian,
- 7). Optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum,
- 8). Integrasi pengendalian kinerja APBD dengan pencapaian indikator kegiatan dan indikator program,
- 9). Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pencapaian target pembangunan dengan sumber dana bantuan keuangan,
- 10). Peningkatan akuntabilitas pelaporan kinerja APBD dan bantuan keuangan melalui penyempurnaan sistem informasi pelaporan APBD dan bantuan keuangan,
- 11). Peningkatan peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam pembinaan penyusunan LKPJ Kabupaten/Kota,
- 12). Optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota,
- 13). Peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH,
- 14). Peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum,

- 15). Optimalisasi pendampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM,
- 16). Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan,
- 17). Optimalisasi pendampingan dan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota,
- 18). Optimalisasi pendampingan dalam rangka pelaksanaan ANJAB pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota,
- 19). Peningkatan pembinaan dan evaluasi implementasi standar pelayanan public,
- 20). Optimalisasi fungsi pembinaan dan evaluasi ketatalaksanaan perangkat daerah,
- 21). Peningkatan pembinaan implementasi Sistem AKIP dan ZI pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
- 22). Peningkatan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota,
- 23). Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
- 24). Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
- 25). Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang Perekonomian,
- 26). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset,
- 27). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
- 28). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Umum,
- 29). Peningkatan efektifitas fungsi pelayanan pengadaan barang/jasa,
- 30). Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor yang mendukung pencapaian sasaran,
- 31). peningkatan fungsi pembinaan melalui pendampingan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota, dan
- 32). Peningkatan kualitas pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan target dan rencana anggaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja Setda tahun anggaran 2021. Mencermati berbagai keadaan antara lain tingkat ketercapaian indikator kinerja tahun sebelumnya, kondisi keuangan daerah, kondisi makro ekonomi, dan tantangan berbagai bidang, maka dilakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD yang dituangkan dalam Hasil Analisis Kebutuhan sebagaimana tabel 2.3. berikut:

TABEL 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
	Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				7.701.250.000	Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				7.484.100.000	
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	100 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	100 %		
			Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %		
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	85 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	85 %		
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	100 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	100 %		
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	100 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	100 %		
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	85 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	85 %		
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100 %		
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	100 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	100 %		
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %		
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100 %		
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	85 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	85 %		
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80 %				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80 %		
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				2.216.000.000	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				2.070.000.000	
			Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	91 %				Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	91 %		
			Persentase efektifitas produk hukum daerah	91 %				Persentase efektifitas produk hukum daerah	91 %		
	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah				35.573.300.000	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah				30.803.000.000	
			Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	87 %				Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	87 %		
			Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	82 %				Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	82 %		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
			Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	87 %				Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	87 %		
			Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	100 %				Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	100 %		
			Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %				Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %		
			Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %				Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %		
			Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %				Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %		
			presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	45 %				presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	45 %		
			Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	84 %				Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	84 %		
			Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	22,12 %				Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	22,12 %		
			Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	67,99 %				Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	67,99 %		
			Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	74 %				Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	74 %		
			Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	42 %				Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	42 %		
			Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	91 %				Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	91 %		
			Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	91 %				Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	91 %		
			Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	91 %				Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	91 %		
			Persentase kabupaten/kota peduli HAM	91 %				Persentase kabupaten/kota peduli HAM	91 %		
			Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	89 %				Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	89 %		
			Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	90 %				Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	90 %		
			Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %				Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %		
			Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %				Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %		
			Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %				Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	85 %		

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
			Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	90 %				Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	90 %		
			Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	91 %				Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	91 %		
			Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	73 %				Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	73 %		
			Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	73 %				Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	73 %		
			Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	23 %				Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	23 %		
			Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	82 %				Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	82 %		
	Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah				4.060.000.000	Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah				3.848.000.000	
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %				Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %		
			Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %				Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %		
			Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %				Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %		
			Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %				Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100 %		
			Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	83 %				Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	83 %		
			Persentase tingkat kesehatan BUMD	82 %				Persentase tingkat kesehatan BUMD	82 %		
			Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %				Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %		
			Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %				Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %		
			Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %				Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %		
			Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %				Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2.630.200.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2.299.000.000	
			Persentase tertib administrasi pemerintahan	100 %				Persentase tertib administrasi pemerintahan	100 %		
			Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100 %				Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100 %		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				3.000.000.000	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				1.950.800.000	
			Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %				Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %		
			Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100 %				Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100 %		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah				81.471.150.000	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah				76.321.743.000	
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	100 %				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	100 %		
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100 %				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100 %		
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	100 %				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	100 %		
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 %				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 %		
			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100 %				Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100 %		
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100 %				Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100 %		
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	100 %				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	100 %		
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	100 %				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	100 %		
			Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	100 %				Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	100 %		
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %				Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				245.000.000	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				275.000.000	
			Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	85 %				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	85 %		
	Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan				26.060.000.000	Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan				25.085.000.000	
			Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	100 %				Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	100 %		
			Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100 %				Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100 %		
			Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100 %				Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100 %		
TOTAL ANGGARAN					162.956.900.000	TOTAL ANGGARAN					150.136.643.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan usulan kegiatan dari masyarakat karena bukan lembaga teknis. Usulan kegiatan masyarakat yang masuk ke Setda dilaksanakan oleh Dinas Teknis.

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021 PROVINSI JAWA TENGAH

[illegible]

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Guna mendorong pencapaian target-target kinerja pembangunan sebagaimana dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dinamika situasi global, nasional, dan regional perlu diantisipasi dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Sinergi Renja dengan berbagai situasi dinamis diarahkan dalam rangka mencapai Visi RPJMD Tahun 2018-2023, “*Menuju Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*” dan Misi Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran dan Guyup untuk Menjaga NKRI;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Membuka Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran;
4. Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya dan Mencintai Lingkungan.

Selama tahun 2013-2018 capaian reformasi birokrasi yang paling mendasar adalah berhasil menempatkan rakyat pada tempat yang terhormat dimana ruang rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penentuan arah dan pengawasan pembangunan menjadi semakin terbuka. Pada gilirannya partisipasi masyarakat mampu mendorong reformasi birokrasi yang semakin berpihak kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat secara dinamis. Birokrasi telah ditempatkan sebagai subyek reformasi yang mendapatkan manfaat (*benefit*) dari reformasi itu sendiri, serta juga telah berhasil meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi, dan akuntabel.

Perwujudan reformasi birokrasi di Jawa Tengah tetap dilandaskan pada nilai utama *tetep mboten korupsi, mboten ngapusi*, yang diarahkan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka; efektivitas, efisiensi dan akutabilitas manajemen pemerintahan; serta efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur

yang baik. Cakupan penguatan reformasi birokrasi tidak hanya pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Salah satu sasaran dalam implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif. Penerapan reformasi kabupaten/kota akan dilaksanakan melalui koordinasi dan fasilitasi secara intensif utamanya dalam penyusunan roadmap dan pengawalan rencana aksi pada lingkup kabupaten/kota.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketidakstabilan baik secara global maupun nasional. Pandemi Covid-19 selain menimbulkan ancaman kesehatan juga berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Sebagai upaya antisipasi atas dampak pandemi tersebut, pada tanggal 27 Maret 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021 fokus pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah adalah post-pandemic recovery.

Arah kebijakan strategis nasional dan daerah menjadi penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 terkait dengan isu baik nasional maupun regional. Berikut isu strategis nasional dan daerah yang tertuang dalam RPJMN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang perlu sinergikan pencapaiannya dalam pelaksanaan agenda Renja Setda tahun 2021.

Tabel 3.1.

Isu-isu Pembangunan Nasional dan Daerah

Isu Nasional (RPJMN 2014-2019)	Isu Daerah (RPJPD 2005-2025)
1. Stabilitas politik dan keamanan	1. Sosial budaya dan Kehidupan beragama
2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien	2. Ekonomi
3. Pemberantasan korupsi	3. Iptek
4. Pertumbuhan ekonomi	4. Sarpras
5. Percepatan pemerataan dan keadilan	5. Politik dan Tata Pemerintahan
6. Keberlanjutan pembangunan	6. Keamanan dan Ketertiban
7. Peningkatan kualitas SDM	7. Hukum dan Aparatur
8. Kesenjangan antar wilayah	8. Wilayah dan Tata ruang
9. Percepatan pembangunan kelautan	

Guna mendukung terciptanya sinergitas pembangunan nasional dan daerah tersebut, Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 akan melaksanakan beberapa program yang mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Perekonomian Pembangunan; dan Program Penataan Administrasi Umum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.2.1 Tujuan

Guna memecahkan permasalahan serta menangani berbagai isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah, yaitu:

”Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”.

3.2.2 Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yaitu:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah,
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 merencanakan pelaksanaan sejumlah program, yaitu:

Sasaran Pertama, Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah akan diwujudkan melalui dua program, yaitu: Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran Kedua, Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan diwujudkan melalui empat program, yaitu: Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Program Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah, Program Adminstrasu Penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sasaran Ketiga, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah akan diwujudkan melalui tiga program, yaitu: Program Pelayanan Umum, Keprotokolan dan Kehumasan; Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah; dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah		Persentase Kebijakan yang Efektif	%	82
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	81
			Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	77
		Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	85
			Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	85
			Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	80
			Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	85
			Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	90
			Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	92
			Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	87
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	83

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	83
			Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	82
			Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	92
			peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	92
			Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	92
			Nilai Kematangan Organisasi Daerah	angka	25
			presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	76,48
			Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	78
			Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	54
			Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	88
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	85
			Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	90
			Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	65
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	88
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	85
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	100
			Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100
			Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	77

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021 berikut dengan indikator kinerja program, target, dan pagu indikatif yang dituangkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	NON URUSAN																	
0.00	NON URUSAN																	
0.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	%	85					142.389.575.000		190.648.668.000		
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100									
0.00.01.1.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													255.000.000		250.000.000		
0.00.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah									Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	1 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	85 %	155.000.000	1 Dokumen	150.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
0.00.01.1.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah									Jumlah laporan evaluasi Setda	1 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	85 %	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
0.00.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan													99.027.004.000		99.027.004.000		
0.00.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									Jumlah Laporan PD (Jenis)	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	99.027.004.000	12 Bulan	99.027.004.000		
0.00.01.1.02.03	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi									Jumlah Laporan PD (Jenis)	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	12 Bulan	-		
0.00.01.1.02.04	Sub Kegiatan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan									Jumlah Laporan PD (Jenis)	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	1 Dokumen	-		
0.00.01.1.02.05	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									Jumlah Laporan PD (Jenis)	3 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	3 Dokumen	-		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
0.00.01.1.02.07	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran									Jumlah Laporan PD (Jenis)	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	12 Bulan	-			
0.00.01.1.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran									Jumlah Laporan PD (Jenis)	2 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	2 Dokumen	-			
0.00.01.1.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun									Jumlah Laporan PD (Jenis)	1 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	1 Dokumen	-			
0.00.01.1.03	Kegiatan Administrasi Umum													42.573.085.000		89.591.631.000			
0.00.01.1.03.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat																		
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro infrastruktur dan sumber daya alam	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber daya Alam	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro infrastruktur dan sumber daya alam	100 %	120.000.000	12 Bulan	23.000.000		Biro Infrastruktur dan Sumber daya Alam	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro hukum	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro hukum	100 %	25.000.000	12 Bulan	82.000.000		Biro Hukum	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100 %	21.000.000	12 Bulan	90.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro perekonomian	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro perekonomian	100 %	28.000.000	12 Bulan	50.000.000		Biro Perekonomian	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro kesejahteraan rakyat	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro kesejahteraan rakyat	100 %	9.000.000	12 Bulan	12.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro umum	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Umum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro umum	100 %	84.000.000	12 Bulan	400.000.000		Biro Umum	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	27.000.000	12 Bulan	250.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. pengadaan barang dan jasa	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. pengadaan barang dan jasa	100 %	20.000.000	12 Bulan	55.000.000		Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	
0.00.01.1.03.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	9.500.000.000	12 Bulan	9.500.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	11.330.000.000	12 Bulan	12.000.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	150.000.000	12 Bulan	150.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.05	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	338.000.000	12 Bulan	1.600.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	300.000.000	12 Bulan	500.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah Laporan PD (Jenis)	0 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	1.197.500.000	0 Laporan	2.300.000.000		Biro Umum	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
							Capaian Program				Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp		
				Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target								
					Satuan	Volum e		Satuan	Volum e										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
0.00.01.1.03.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	4.500.000.000	12 Bulan	5.000.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	27.000.000	12 Bulan	130.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis																		
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	261.000.000	12 Bulan	1.500.000.000		Biro Umum	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	94.171.000	12 Bulan	116.379.000		Biro Organisasi	
0.00.01.1.03.11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	10 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	161.000.000	10 Bulan	800.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	455.000.000	12 Bulan	500.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	140.000.000	12 Bulan	665.000.000		Biro Umum	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
0.00.01.1.03.14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	116.000.000	12 Bulan	550.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	42.000.000	12 Bulan	200.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan																		
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro infrastruktur dan sumber daya alam	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber daya Alam	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro infrastruktur dan sumber daya alam	100 %	55.000.000	12 Bulan	65.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro hukum	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro hukum	100 %	25.000.000	12 Bulan	80.000.000		Biro Hukum	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100 %	30.000.000	12 Bulan	950.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro perekonomian	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Perekonomian	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro perekonomian	100 %	20.000.000	12 Bulan	45.000.000		Biro Perekonomian	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro kesejahteraan rakyat	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro kesejahteraan rakyat	100 %	60.000.000	12 Bulan	125.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro organisasi	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Organisasi	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro organisasi	100 %	52.360.000	12 Bulan	61.252.000		Biro Organisasi	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
							Capaian Program				Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp		
				Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target								
					Satuan	Volume		Satuan	Volume										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro umum	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Umum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro umum	100 %	2.320.000.000	12 Bulan	11.000.000.000		Biro Umum	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	15.000.000	12 Bulan	35.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. pengadaan barang dan jasa	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. pengadaan barang dan jasa	100 %	30.000.000	12 Bulan	95.000.000		Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	
0.00.01.1.03.18	Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro infrastruktur dan sumber daya alam	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah biro infrastruktur dan sumber daya alam	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro infrastruktur dan sumber daya alam	100 %	810.000.000	12 Bulan	775.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro hukum	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro hukum	100 %	195.000.000	12 Bulan	550.000.000		Biro Hukum	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100 %	264.000.000	12 Bulan	680.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro perekonomian	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro perekonomian	100 %	210.000.000	12 Bulan	365.000.000		Biro Perekonomian	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
							Capaian Program				Keluaran		Hasil					
				Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e		Satuan	Volum e									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro kesejahteraan rakyat	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro kesejahteraan rakyat	100 %	270.000.000	12 Bulan	500.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro organisasi	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Organisasi	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro organisasi	100 %	320.758.000	12 Bulan	490.000.000		Biro Organisasi
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro umum	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Umum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro umum	100 %	1.000.000.000	12 Bulan	5.250.000.000		Biro Umum
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	460.112.000	12 Bulan	750.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. pengadaan barang dan jasa	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. pengadaan barang dan jasa	100 %	300.000.000	12 Bulan	700.000.000		Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa
0.00.01.1.03.20	Sub Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Diadakan	5 unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	5 unit	1.500.000.000		Biro Umum
0.00.01.1.03.21	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Diadakan	5 unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	5 unit	3.000.000.000		Biro Umum

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volume	Tolok Ukur	Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
0.00.01.1.03.22	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	10 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	10 Unit	1.500.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.23	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	10 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	10 Unit	1.700.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.24	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	10 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	218.000.000	10 Unit	1.500.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.25	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	10 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	1.345.680.000	10 Unit	2.500.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.26	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	10 unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	400.000.000	10 unit	1.000.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.27	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	677.000.000	12 Bulan	677.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	127.000.000	12 Bulan	750.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	2.376.504.000	12 Bulan	6.500.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.30	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	216.000.000	12 Bulan	1.020.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.03.31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	952.000.000	12 Bulan	4.800.000.000		Biro Umum	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
							Capaian Program			Keluaran		Hasil						
				Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0.00.01.1.03.32	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	12 Bulan	150.000.000		Biro Umum
0.00.01.1.03.33	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	200.000.000	12 Bulan	800.000.000		Biro Umum
0.00.01.1.03.34	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	-	12 Bulan	180.000.000		Biro Umum
0.00.01.1.03.35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	641.000.000	12 Bulan	2.850.000.000		Biro Umum
0.00.01.1.03.36	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	37.000.000	12 Bulan	175.000.000		Biro Umum
0.00.01.1.04	Kegiatan Peningkatan Displin dan Kapasitas Apartur						Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100					534.486.000		1.780.033.000		
0.00.01.1.04.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	50 Orang	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	100 %	50.000.000	50 Orang	60.000.000		Biro Umum
0.00.01.1.04.03	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan						Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	-	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	100 %	-	-	48.000.000		Biro Umum
0.00.01.1.04.04	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri						Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	800 Orang	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	100 %	-	400 Orang	612.000.000		Biro Umum

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
0.00.01.1.04.05	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	120 Orang	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	100 %	40.000.000	120 Orang	80.000.000		Biro Umum	
0.00.01.1.04.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal						Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	40 Orang	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	100 %	168.872.000	40 Orang	306.260.000		Biro Umum	
0.00.01.1.04.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi Kepegawaiannya	12 Bulan	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	100 %	275.614.000	12 Bulan	673.773.000		Biro Umum	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77.00								400.431.988.000		31.533.200.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Hukum	
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%	100									Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
							Persentase tertib administrasi pemerintahan	%	100									Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
							Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100									Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
							Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	100									Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
							Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100									Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%	100									Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
							Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	%	92									Biro Hukum
							Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	93									Biro Hukum
							Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	92									Biro Hukum
							Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	%	92									Biro Hukum
							Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	%	92									Biro Hukum
							Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	93									Biro Hukum
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	%	100									Biro Kesejahteraan Rakyat
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	%	100									Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp			
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100									Biro Kesejahteraan Rakyat	
							Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90										Biro Kesejahteraan Rakyat
							Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90										Biro Kesejahteraan Rakyat
							Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90										Biro Kesejahteraan Rakyat
							Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	%	100										Biro Kesejahteraan Rakyat
							Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90										Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
							Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90									Biro Kesejahteraan Rakyat	
4.01.02.1.01	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah													5.697.888.000		12.240.200.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
												Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %				Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	100 %				Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		
												Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %				Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		
												Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100 %				Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		
												Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100 %				Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		
												Persentase tertib administrasi pemerintahan	100 %				Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		
4.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah									Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	1 Dokumen	Persentase tertib administrasi pemerintahan	100 %	39.777.000	1 Dokumen	158.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
										Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	1 Dokumen			44.071.000	1 Dokumen	166.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
										Jumlah dokumen penegasan batas daerah	2 Dokumen			445.152.000	2 Dokumen	586.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
										Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan			234.000.000	1 Laporan	600.200.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
4.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum									Jumlah dokumen fasilitas masalah pertanahan/ konflik pertanahan	1 Laporan	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	100 %	334.088.000	1 Laporan	560.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
										Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	1 Laporan			2.800.000	1 Laporan	97.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	1 Dokumen			50.000.000	1 Dokumen	75.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
4.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD									Jumlah dokumen fasilitas KDH dan Wakil KDH	21 Dokumen	Persentase fasilitas dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100 %	1.336.233.000	7 Dokumen	1.500.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
										Jumlah dokumen fasilitas PAW Anggota DPRD	20 Dokumen			82.767.000	30 Dokumen	411.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
4.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan									Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	36 Wilayah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100 %	257.478.000	36 Wilayah	285.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp			
							Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
										Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36 Wilayah			34.574.000	36 Wilayah	285.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
										Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36 Wilayah			37.948.000	36 Wilayah	285.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
4.01.02.1.01.05	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan									Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota	13 Dokumen	Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %	518.000.000	13 Dokumen	1.240.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
										Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota	0 Dokumen			-	1 Dokumen	335.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
4.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah									Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	100 %	Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	479.213.000	100 %	575.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
										Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	1 Dokumen			598.214.000	1 Dokumen	2.350.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
										Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	1 Dokumen			548.125.000	1 Dokumen	800.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
										Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	30 Dokumen			485.448.000	30 Dokumen	1.380.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
4.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta									Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	20 Dokumen	Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	170.000.000	20 Dokumen	552.000.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat													390.739.100.000		12.100.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	100 %					Biro Kesejahteraan Rakyat	
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100 %					Biro Kesejahteraan Rakyat	
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %					Biro Kesejahteraan Rakyat	
												Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	90 %					Biro Kesejahteraan Rakyat	
												Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	90 %					Biro Kesejahteraan Rakyat	
												Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	90 %					Biro Kesejahteraan Rakyat	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
					Satuan	Volum e		Satuan	Volum e										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
												Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	100 %					Biro Kesejahteraan Rakyat	
												Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	90 %					Biro Kesejahteraan Rakyat	
												Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	90 %					Biro Kesejahteraan Rakyat	
4.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual									Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama	1 Dokumen			19.533.000.000	1 Dokumen	50.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	2 Dokumen			200.000.000	2 Dokumen	350.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
4.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual									Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama	1 Dokumen			365.211.100.000	1 Dokumen	150.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	1 Laporan			1.780.000.000	1 Laporan	2.500.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	1 Dokumen			800.000.000	1 Dokumen	2.500.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	2 Dokumen			190.000.000	2 Dokumen	350.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran			Hasil		Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.01.02.1.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar									Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen			80.000.000	1 Dokumen	200.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	1 Dokumen			80.000.000	1 Dokumen	200.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil	1 Dokumen			405.000.000	1 Dokumen	700.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen			275.000.000	1 Dokumen	600.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen			100.000.000	1 Dokumen	225.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	1 Dokumen			90.000.000	1 Dokumen	200.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen			80.000.000	1 Dokumen	200.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Satuan	Volum e	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
										Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen			200.000.000	1 Dokumen	350.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen			90.000.000	Dokumen	225.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
4.01.02.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar									Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan	1 Dokumen			80.000.000	1 Dokumen	200.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	1 Dokumen			80.000.000	1 Dokumen	200.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen			80.000.000	1 Dokumen	200.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen			250.000.000	1 Dokumen	450.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	1 Dokumen			325.000.000	1 Dokumen	600.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
										Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	1 Dokumen			400.000.000	Dokumen	775.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
4.01.02.1.02.05	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan									Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan	1 Dokumen			135.000.000	1 Dokumen	300.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
4.01.02.1.02.06	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial									Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen			100.000.000	1 Dokumen	225.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Satuan	Volum e	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.01.02.1.02.07	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan									Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	1 Laporan			175.000.000	1 Laporan	350.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat	
4.01.02.1.03	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah													3.995.000.000		7.193.000.000		Biro Hukum	
												Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	92 %					Biro Hukum	
												Persentase efektifitas produk hukum daerah	93 %					Biro Hukum	
												Persentase kabupaten/kota peduli HAM	92 %					Biro Hukum	
												Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	92 %					Biro Hukum	
												Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	92 %					Biro Hukum	
												Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	93 %					Biro Hukum	
4.01.02.1.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	15 Raperda	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	93 %	600.000.000	16 Raperda	845.600.000		Biro Hukum	
										Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	350 Dokumen			500.000.000	130 Dokumen	845.600.000		Biro Hukum	
										Jumlah produk hukum yang dikaji	19 Dokumen			294.000.000	15 Dokumen	362.400.000		Biro Hukum	
										Jumlah produk hukum yang disosialisasi	4 Dokumen	Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	92 %	111.000.000	4 Dokumen	362.400.000		Biro Hukum	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.01.02.1.03.02	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya									Jumlah produk hukum yang didokumentasi	90 Dokumen	Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	92 %	215.000.000	90 Dokumen	350.000.000		Biro Hukum	
										Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	70 Dokumen		115.000.000	75 Dokumen	275.000.000		Biro Hukum		
										Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	150 Buku		170.000.000	150 Buku	250.000.000		Biro Hukum		
4.01.02.1.03.03	Sub Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota									Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	132 Dokumen	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	92 %	350.000.000	138 Dokumen	633.000.000		Biro Hukum	
										Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	128 Dokumen		300.000.000	132 Dokumen	633.000.000		Biro Hukum		
4.01.02.1.03.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum									Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	200 Perkara	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	92 %	485.856.000	220 Perkara	750.000.000		Biro Hukum	
										Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	9 Perkara		496.644.000	10 Perkara	750.000.000		Biro Hukum		
										Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	1 Laporan		-	1 Laporan	400.000.000		Biro Hukum		
4.01.02.1.03.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM									Penanganan sengketa hukum	6 Sengketa	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	92 %	163.506.000	7 Sengketa	336.000.000		Biro Hukum	
										Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	35 Kabupaten/ Kota		193.994.000	35 Kab/Kota	400.000.000		Biro Hukum		
4.01.03	Program Perekonomian Pembangunan			Indeks Reforma si Birokrasi	Angka	77.00								15.855.000.000		29.635.000.000		Biro Perekonomian; Biro Infrastruktur dan SDA; Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Adminisrasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	%	80									Biro Perekonomian
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	%	90									Biro Perekonomian
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%	88									Biro Perekonomian
							Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	93									Biro Perekonomian
							Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90									Biro Perekonomian
							Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	75									Biro Perekonomian
							Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	85									Biro Perekonomian

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
							Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	87									Biro Perekonomian	
							Persentase tingkat kesehatan BUMD	%	70										Biro Perekonomian
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	%	100										Biro Infrastruktur dan SDA
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	%	100										Biro Infrastruktur dan SDA
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	%	100										Biro Infrastruktur dan SDA
							Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90										Biro Infrastruktur dan SDA
							Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90										Biro Infrastruktur dan SDA

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
							Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90									Biro Infrastruktur dan SDA	
							Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90									Biro Infrastruktur dan SDA	
							Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90									Biro Infrastruktur dan SDA	
							Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90									Biro Infrastruktur dan SDA	
							Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	%	85									Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
							Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	%	81									Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
							Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	%	100									Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
							Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	%	88									Biro Administrasi Pembangunan Daerah	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	84									Biro Administrasi Pembangunan Daerah
							Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100									Biro Administrasi Pembangunan Daerah
							Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	%	76									Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
							Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%	76									Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
							Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	%	92									Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
							Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100									Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian												6.610.000.000		12.135.000.000		Biro Perekonomian; Biro Infrastruktur dan SDA	
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80 %				Biro Perekonomian	
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	90 %				Biro Perekonomian	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran			Hasil		Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volume	Tolok Ukur	Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	88 %					Biro Perekonomian	
												Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	93 %						Biro Perekonomian
												Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	90 %						Biro Perekonomian
												Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	75 %						Biro Perekonomian
												Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85 %						Biro Perekonomian
												Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	87 %						Biro Perekonomian
												Persentase tingkat kesehatan BUMD	70 %						Biro Perekonomian

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target			Rp
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100 %					Biro Infrastruktur dan SDA
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	100 %					Biro Infrastruktur dan SDA
												Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	90 %					Biro Infrastruktur dan SDA
												Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	90 %					Biro Infrastruktur dan SDA
												Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	90 %					Biro Infrastruktur dan SDA
												Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	90 %					Biro Infrastruktur dan SDA

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro									Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 Dokumen			120.000.000	2 Dokumen	220.000.000		Biro Perekonomian	
										jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 Dokumen			148.000.000	2 Dokumen	275.000.000		Biro Perekonomian	
										Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 Dokumen			132.000.000	2 Dokumen	242.000.000		Biro Perekonomian	
4.01.03.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro									Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen			150.000.000	1 Dokumen	280.000.000		Biro Perekonomian	
										Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	3 Dokumen			221.210.000	3 Dokumen	400.000.000		Biro Perekonomian	
										Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	1 Dokumen			111.000.000	1 Dokumen	200.000.000		Biro Perekonomian	
										jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	3 Dokumen			325.300.000	3 Dokumen	600.000.000		Biro Perekonomian	
										jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	1 Dokumen			152.333.000	1 Dokumen	280.000.000		Biro Perekonomian	
										jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen			403.100.000	2 Dokumen	750.000.000		Biro Perekonomian	
										jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	2 Dokumen			1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000		Biro Perekonomian	
										Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen			145.547.000	2 Dokumen	250.000.000		Biro Perekonomian	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.01.03.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan									Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	1 Dokumen			100.000.000	1 Dokumen	168.000.000		Biro Perekonomian	
										Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	3 Dokumen			291.510.000	3 Dokumen	550.000.000		Biro Perekonomian	
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	2 Dokumen			150.000.000	2 Dokumen	225.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	2 Laporan			100.000.000	2 Laporan	250.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	2 Laporan			250.000.000	6 Laporan	800.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	2 Dokumen			250.000.000	2 Dokumen	450.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	1 Dokumen			82.000.000	2 Dokumen	200.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	1 Laporan			150.000.000	3 Laporan	250.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	1 Laporan			106.000.000	2 Laporan	300.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan	1 Laporan			100.000.000	1 Laporan	250.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Laporan			102.000.000	1 Laporan	250.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen			45.450.000	1 Dokumen	135.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Laporan			59.760.000	2 Laporan	135.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Laporan			124.790.000	2 Laporan	192.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
4.01.03.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen			32.220.000	2 Dokumen	90.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan			23.250.000	1 Laporan	90.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	2 Laporan			56.000.000	2 Laporan	145.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Laporan			54.530.000	4 Laporan	128.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen			25.100.000	1 Dokumen	110.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	1 Laporan			28.900.000	1 Laporan	110.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	2 Laporan			84.905.000	1 Laporan	145.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
4.01.03.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	2 Laporan			84.905.000	1 Laporan	145.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja		
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp				
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen			54.925.000	1 Dokumen	115.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA		
										jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	1 Laporan			90.170.000	1 Laporan	115.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA		
4.01.03.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha									Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	1 Dokumen			227.865.000	1 Dokumen	450.000.000		Biro Perekonomian		
										jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	4 Dokumen			240.379.000	4 Dokumen	430.000.000		Biro Perekonomian		
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	5 Dokumen			311.756.000	5 Dokumen	530.000.000		Biro Perekonomian		
4.01.03.1.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi									Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	2 Dokumen			180.000.000	2 Dokumen	350.000.000		Biro Perekonomian		
										jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	3 Dokumen			174.000.000	3 Dokumen	325.000.000		Biro Perekonomian		
										Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	3 Dokumen			206.000.000	3 Dokumen	350.000.000		Biro Perekonomian		
4.01.03.1.02	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa													3.850.000.000		8.300.000.000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		
														Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	76 %					Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
														Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	76 %					Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Satuan	Volume	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
												Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	92 %					Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
												Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %					Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.03.1.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa									Jumlah Dokumen SHB dan ASB	2 Dokumen			450.000.000	2 Dokumen	850.000.000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa									Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	100 %			1.100.000.000	100 %	2.550.000.000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa									Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa	100 %			450.000.000	100 %	850.000.000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik									Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP	100 %			200.000.000	100 %	425.000.000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
										Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	100 %			200.000.000	100 %	425.000.000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.03.1.02.05	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa									Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100 %			500.000.000	100 %	1.100.000.000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.03.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	72 %			250.000.000	73 %	300.000.000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.03.1.02.07	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa									Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	100 %			300.000.000	100 %	700.000.000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Satuan	Volume	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.01.03.1.02.08	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa									Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi	100 %			400.000.000	100 %	1.100.000.000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.03.1.03	Kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan													5.395.000.000		9.200.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Infrastruktur dan SDA	
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	100 %					Biro Infrastruktur dan SDA	
												Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	90 %					Biro Infrastruktur dan SDA	
												Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	90 %					Biro Infrastruktur dan SDA	
												Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	85 %					Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
												Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	81 %					Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
												Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	100 %					Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
												Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	88 %					Biro Administrasi Pembangunan Daerah	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
Satuan	Volum e	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
												Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	84 %					Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
												Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaannya fungsinya	100 %						
4.01.03.1.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD									Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	81 %		300.000.000	81 %	400.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah		
										Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	84 %		250.000.000	84 %	400.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah		
										Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	87 %		250.000.000	87 %	500.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah		
4.01.03.1.03.02	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN									Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	86 %		350.000.000	86 %	1.200.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah		
4.01.03.1.03.03	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah									Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	83 %		260.710.000	83 %	700.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah		
										Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	83 %		239.290.000	83 %	800.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah		
4.01.03.1.03.04	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah									Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	1 Dokumen		975.000.000	1 Dokumen	1.650.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah		
										Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen		75.000.000	1 Dokumen	100.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
Satuan	Volum e	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.01.03.1.03.05	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah									Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	12 Laporan			425.000.000	12 Laporan	525.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
										Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	12 Laporan			575.000.000	12 Laporan	525.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
4.01.03.1.03.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah									jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Laporan			165.000.000	2 Laporan	225.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen			300.000.000	3 Dokumen	400.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Laporan			200.000.000	4 Laporan	300.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	2 Laporan			260.000.000	4 Laporan	375.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Laporan			200.000.000	2 Laporan	325.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Dokumen			320.000.000	3 Dokumen	400.000.000		Biro Infrastruktur dan SDA	
										Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	1 Dokumen			150.000.000	1 Dokumen	175.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
										Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	1 Laporan			100.000.000	1 Laporan	200.000.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran			Hasil		Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Satuan	Volum e	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.01.04	Program Penataan Administrasi Umum			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77.00								4.101.040.000		6.917.029.000		Biro Organisasi; Biro Umum	
							Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	31										Biro Organisasi
							Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%	87										Biro Organisasi
							Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	%	57										Biro Organisasi
							Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%	85										Biro Organisasi
							Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	78,59										Biro Organisasi
							Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%	83										Biro Organisasi
							Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	34,59										Biro Organisasi
							presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	51										Biro Organisasi
							4.01.04.1.01	Kegiatan Penataan Organisasi										Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	31 %

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokas i	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
Satuan	Volum e	Satuan	Volum e																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
												Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	87 %					Biro Organisasi	
												Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	57 %					Biro Organisasi	
												Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	85 %					Biro Organisasi	
												Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	79 %					Biro Organisasi	
												Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	83 %					Biro Organisasi	
												Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	35 %					Biro Organisasi	
												presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	51 %					Biro Organisasi	
4.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi								Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	41 OPD			481.500.000	41 OPD	850.000.000		Biro Organisasi		
4.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota								Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	35 Kab/Kota			327.165.000	35 Kab/Kota	588.500.000		Biro Organisasi		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
					Satuan	Volume	Tolok Ukur	Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.01.04.1.01.03	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan									Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	41 OPD			215.500.000	41 OPD	347.750.000		Biro Organisasi	
										Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	35 Kab/Kota			174.795.000	35 Kab/Kota	347.750.000		Biro Organisasi	
4.01.04.1.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB	35 Kab/Kota			352.758.000	35 Kab/Kota	609.470.000		Biro Organisasi	
										Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	41 OPD			297.242.000	41 OPD	383.559.000		Biro Organisasi	
4.01.04.1.01.05	Sub Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja									Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	41 OPD			232.620.000	41 OPD	367.500.000		Biro Organisasi	
										Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	35 Kab/Kota			232.630.000	35 Kab/Kota	367.500.000		Biro Organisasi	
										Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	35 Kab/Kota			106.025.000	35 Kab/Kota	167.500.000		Biro Organisasi	
										Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	41 OPD			106.025.000	41 OPD	167.500.000		Biro Organisasi	
4.01.04.1.01.06	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja									Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	- -			-	41 OPD	220.000.000		Biro Organisasi	
4.01.04.1.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan									Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	35 Kab/Kota			228.132.000	35 Kab/Kota	575.000.000		Biro Organisasi	
										Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	240 Unit			575.268.000	240 Unit	575.000.000		Biro Organisasi	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Rp.	Target	Rp		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Satuan	Volume	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.01.04.1.01.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik									jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	35 Kab/Kota			290.700.000	35 Kab/Kota	675.000.000		Biro Organisasi	
										Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	150 Unit			480.680.000	150 Unit	675.000.000		Biro Organisasi	
TOTAL														562.777.603.000		258.733.897.000			

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan rangkaian proses perencanaan tahun ketiga pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, penjabaran RKPD 2021, dan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 mengikuti prinsip *money follows* program dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 fokus kepada upaya meningkatkan efektivitas manajemen pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Melalui Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 diharapkan kinerja pembangunan daerah semakin sinergis, efektif, akuntabel, pelayanan berkualitas, serta mensinergiskan gerak langkah seluruh pelaku pembangunan di daerah.